

BAB III



GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



2017 - 2022

RPJMD KABUPATEN PATI

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Pasal 279, ayat (2) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bidang Keuangan Daerah, dinyatakan sebagai berikut: (i) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (ii) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (DAPER); (iii) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (iv) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Khusus terkait dengan pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan / stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Pati. Oleh karenanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 280, ayat (2); telah dinyatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: (i) Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (ii) Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (iii) Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Gambaran kondisi keuangan daerah di Kabupaten Pati, dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2018-2022, dibagi ke dalam 3 (tiga) pembahasan, yaitu: (i) Kinerja Masa Lalu,

(ii) Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu, dan (iii) Kerangka Pendanaan. Penjelasan dari masing-masing bagian, akan dijelaskan secara terperinci pada bagian berikut.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu adalah kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu mulai tahun 2017 hingga tahun 2022.

Kinerja keuangan masa lalu yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup: (i) Kinerja Pelaksanaan APBD, dan (ii) Neraca Daerah. Penjelasan selengkapnya akan dibahas pada bagian berikut.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan APBD menguraikan perkembangan Pendapatan Daerah, Proporsi Sumber Pendapatan, Pencapaian Kinerja Pendapatan, dan gambaran Realisasi Belanja Daerah, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Rincian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2012 hingga tahun 2017, selengkapnya akan dibahas pada bagian berikut ini.

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, ayat (26) telah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pati dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2012 - 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pendapatan Daerah yang pada tahun 2012 sebesar Rp 1,47 triliun, pada tahun 2017 telah meningkat menjadi sebesar

Rp 2,77 triliun atau mengalami peningkatan / daya tumbuh selama tahun 2012-2017 sebesar 13,37%.

Pada periode yang sama pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan sebesar 22,36%; Dana Perimbangan (DAPER) mengalami pertumbuhan sebesar 11,11%; serta pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 14,76%. Pada pos PAD, pos yang mempunyai daya tumbuh terbesar adalah pos Lain-lain PAD yang Sah (sebesar 26,95%) diikuti oleh pos Pendapatan Pajak Daerah (sebesar 22,36%). Untuk pos DAPER daya tumbuh yang paling besar yaitu pos Dana Alokasi Khusus sebesar 41,91%; sedang untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pos Pendapatan Hibah sebesar 140,18%.

Tabel 3.1**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pati dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2012 -2016 (dalam Ribuan dan Persen)**

NO.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata2 Pertumbuhan
1	PENDAPATAN	1,477,993,190	1,706,030,888	1,940,575,704	2,181,691,961	2,445,063,690	2,768,528,451	13.37
1.1	Pendapatan Asli Daerah	163,733,666	169,127,416	279,254,884	310,063,641	314,921,085	449,106,854	22.36
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	25,002,619	29,451,247	54,511,065	63,369,741	64,394,885	73,677,157	24.13
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	29,379,827	31,119,227	25,626,312	32,186,102	17,932,143	19,009,369	-8.34
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,692,745	6,823,940	10,569,255	10,176,567	15,403,121	14,643,421	20.80
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	103,658,474	101,733,002	188,548,253	204,331,230	217,190,936	341,776,907	26.95
1.2	Dana Perimbangan	997,544,585	1,094,864,464	1,163,930,994	1,214,974,989	1,579,434,897	1,689,030,336	11.11
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66,718,354	61,481,768	40,580,009	35,611,942	44,349,751	39,792,643	-9.82
1.2.2	Dana Alokasi Umum	850,377,211	960,479,326	1,043,498,355	1,086,645,667	1,207,508,997	1,186,296,947	6.88
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	80,449,020	72,903,370	79,852,630	92,717,380	327,576,149	462,940,746	41.91
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	316,714,939	442,039,008	497,389,826	656,653,332	550,707,708	630,391,261	14.76
1.3.1	Pendapatan Hibah	96,775	764,629	695,127	20,105,784	19,632,814	7,734,814	140.18
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	81,697,107	90,655,217	118,247,375	145,137,616	145,205,883	172,499,977	16.12
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174,374,050	247,300,858	276,109,361	427,724,387	286,421,111	371,401,422	16.32
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	60,318,395	103,318,304	102,337,963	63,685,544	99,447,900	78,755,048	5.48

	Daerah Lainnya							
1.3.5	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	228,612	-	-	-	-	-	-100

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Di lain pihak, jika dilihat dari kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap total / keseluruhan Pendapatan Daerah, dapat dilihat bahwa PAD di Kabupaten Pati memberikan sumbangan secara rata-rata selama tahun 2012–2017 adalah sebesar 13,12%; Dana Perimbangan dari pemerintah pusat memberikan kontribusinya sekitar 62,16%; serta pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sekitar 24,73%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Kondisi pencapaian pos-pos Pendapatan Daerah di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2012-2017, didukung dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru khususnya dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan jalan melakukan intensifikasi / pendalaman pos-pos Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan kebijakan ekstensifikasi / perluasan atas pos-pos Pajak Daerah / Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Pati, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Pati.

Tabel 3.2

**Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2012– 2017 (dalam persen)**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Kontribusi (%)
1	PENDAPATAN	100.00						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	11.08	9.91	14.39	14.21	12.88	16.23	13.12
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.69	1.73	2.81	2.90	2.63	2.66	2.40
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.99	1.82	1.32	1.48	0.73	0.69	1.34
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.39	0.40	0.54	0.47	0.63	0.53	0.49
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	7.01	5.96	9.72	9.37	8.88	12.35	8.88
1.2	Dana Perimbangan	67.49	64.18	59.98	55.69	64.60	61.01	62.16
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4.51	3.60	2.09	1.63	1.81	1.44	2.51
1.2.2	Dana Alokasi Umum	57.54	56.30	53.77	49.81	49.39	42.85	51.61

1.2. 3	Dana Alokasi Khusus	5.44	4.27	4.11	4.25	13.40	16.72	8.03
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.43	25.91	25.63	30.10	22.52	22.77	24.73
1.3. 1	Pendapatan Hibah	0.01	0.04	0.04	0.92	0.80	0.28	0.35
1.3. 2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.53	5.31	6.09	6.65	5.94	6.23	5.96
1.3. 3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11.80	14.50	14.23	19.61	11.71	13.42	14.21
1.3. 4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.08	6.06	5.27	2.92	4.07	2.84	4.21
1.3. 5	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.02	-	-	-	-	-	0.00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati (Diolah dari Tabel 3.1)

b. Belanja Daerah

Berdasar Pasal 298 dari UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya yang membahas tentang Belanja Daerah, telah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: (i) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta (iii) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah menurut kelompok belanja, secara umum dikelompokkan / diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: (i) Belanja Tidak Langsung, dan (ii) Belanja Langsung. Penjelasan terhadap kedua jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Belanja Tidak Langsung.** Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a) Belanja Pegawai. Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b) Belanja Bunga. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Pati belum pernah melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - c) Belanja Subsidi. Belanja subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya

produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

- d) Belanja Hibah. Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- e) Belanja Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- f) Belanja Bagi Hasil. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- g) Belanja Bantuan Keuangan. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kabupaten Pati tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tersendiri. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- h) Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

- 2) **Belanja Langsung.** Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
- a) Belanja Pegawai. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b) Belanja Barang dan Jasa. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - c) Belanja Modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pati selama Tahun 2012 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Belanja Daerah di Kabupaten Pati yang pada tahun 2012 sebesar Rp 1,43 triliun, pada tahun 2017 (sampai awal Desember) sudah meningkat menjadi Rp 2,65 triliun atau mengalami peningkatan / daya tumbuh sebesar 13,18%. Pos Belanja Tidak Langsung pada periode yang sama mengalami peningkatan dari sekitar Rp 958,1 miliar pada tahun 2012, menjadi sekitar Rp 1,63 triliun pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan / daya tumbuh sebesar 11,26%. Sebaliknya untuk untuk pos Belanja Langsung juga mengalami peningkatan dari sekitar Rp 467,74 miliar pada tahun 2012, menjadi sekitar Rp 1,01 triliun pada tahun 2017 (sampai awal Desember) atau mengalami peningkatan / daya tumbuh sebesar 16,74%.

Dengan melihat data daya tumbuh selama tahun 2012-2017, dapat dilihat bahwa pos Belanja Langsung mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding pos Belanja Tidak Langsung, yaitu sebesar 16,74% dibanding sebesar 11,26%. Gambaran perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pati selama Tahun 2012 – 2017, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pati dan Rata-Rata Pertumbuhan Tahun 2012– 2016 (dalam Rupiah dan Persen)**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuh- an (%)
2	BELANJA	1.425.840.271.103	1.653.021.493.160	1.862.733.252.569	2.136.260.318.715	2.583.065.999.166	2.647.474.106.916	13.18
2.1	Belanja Tidak Langsung	958.100.246.762	1.072.253.204.469	1.164.629.349.831	1.401.876.577.079	1.720.364.167.574	1.633.350.389.448	11.26
2.1.1	Belanja Pegawai	823.229.194.766	919.483.122.186	1.015.385.522.656	1.076.586.804.416	1.117.507.971.752	1.018.241.693.536	4.34
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.3	Belanja Hibah	47.311.450.233	54.893.391.100	41.951.680.400	18.210.279.328	85.531.600.939	30.254.841.600	-8.55
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	14.590.460.000	6.069.820.000	6.742.313.000	5.485.294.000	6.106.596.000	5.592.847.000	-17.45
2.1.5	Belanja Bagi Hasil	3.900.451.563	3.532.368.683	4.017.581.925	8.050.286.435	9.598.095.386	8.282.702.814	16.25
2.1.6	Belanja bantuan Keuangan	68.939.956.500	88.244.502.500	95.667.065.000	293.376.314.900	501.619.903.497	567.096.011.260	52.42
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	128.733.700	30.000.000	865.186.850	167.598.000	-	3.882.293.238	-97.64
2.2	Belanja Langsung	467.740.024.341	580.768.288.691	698.103.902.738	734.383.741.636	862.701.831.592	1.014.123.717.468	16.74
2.2.1	Belanja Pegawai	39.189.070.944	47.963.045.793	28.218.809.941	26.827.141.075	22.122.469.370	30.381.373.385	-4.96
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254.400.827.621	329.330.799.176	445.231.896.863	428.421.565.025	420.859.483.535	534.893.177.850	16.02
2.2.3	Belanja Modal	174.150.125.776	203.474.443.722	224.653.195.934	279.135.035.536	419.719.878.687	448.849.166.233	20.85

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Jika dilihat dari kontribusinya terhadap total Belanja Daerah, pos Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi secara rata-rata selama tahun 2012-2017 sebesar 64,75%; sedang sisanya sekitar 35,25% disumbang oleh pos Belanja Langsung. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4

Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Kontribusi (%)
2	BELANJA	100.00						
2.1	Belanja Tidak Langsung	67.20	64.87	62.52	65.62	66.60	61.69	64.75
2.1.1	Belanja Pegawai	57.74	55.62	54.51	50.40	43.26	38.46	50.00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	3.32	3.32	2.25	0.85	3.31	1.14	2.37
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.02	0.37	0.36	0.26	0.24	0.21	0.41
2.1.5	Belanja Bagi Hasil	0.27	0.21	0.22	0.38	0.37	0.31	0.29
2.1.6	Belanja bantuan Keuangan	4.84	5.34	5.14	13.73	19.42	21.42	11.65
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	0.01	0.00	0.05	0.01	-	0.15	0.04
2.2	Belanja Langsung	32.80	35.13	37.48	34.38	33.40	38.30	35.25
2.2.1	Belanja Pegawai	2.75	2.90	1.51	1.26	0.86	1.15	1.74
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.84	19.92	23.90	20.05	16.29	20.20	19.70
2.2.3	Belanja Modal	12.21	12.31	12.06	13.07	16.25	16.95	13.81

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Dari tabel tersebut di atas juga dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2012-2017 lebih besar jika dibanding dengan proporsi Belanja Langsung dengan besaran proporsi yang berfluktuasi. Berdasarkan komposisinya Belanja Tidak Langsung pada tahun 2012-2017 didominasi oleh pos Belanja Pegawai, dengan rata-rata sumbangan sebesar 50,00%. Sementara, dalam pos Belanja Langsung masih didominasi oleh pos Belanja Barang dan Jasa, dengan rata-rata sumbangannya selama tahun 2012-2017 sebesar 19,70%.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Pati telah berusaha untuk selalu meningkatkan alokasi Belanja Langsung pada pos Belanja Modal pada setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun besarnya masih sekitar 13,81%; atau kurang dari 15%. Namun demikian, besaran tersebut tetap diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Pati.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2012–2017 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
- 2) Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kerjanya yang dipresentasikan ke dalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan setiap OPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 305 dari UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas perihal Surplus / Defisit Anggaran, dinyatakan bahwa dalam hal APBD **diperkirakan surplus**, APBD dapat **digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah** yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, di mana **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** dapat digunakan untuk pembiayaan: (i) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (ii) Penyertaan Modal Daerah; (iii) Pembentukan Dana cadangan; dan/atau (iv) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam Pasal 305 dari UU Nomor 23 Tahun 2014, juga telah dinyatakan bahwa dalam hal APBD **diperkirakan defisit**, APBD dapat didanai dari **Penerimaan Pembiayaan Daerah** yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penjabaran lebih lanjut juga dinyatakan bahwa **Penerimaan Pembiayaan Daerah** bersumber dari: (i) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (ii) Pencairan dana cadangan; (iii) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; (iv) Pinjaman Daerah; dan (v) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2012-2015, APBD di Kabupaten Pati berada dalam posisi Surplus sementara pada tahun 2016 berada dalam posisi defisit (sebesar Rp 138,0 miliar) dan tahun 2017 berada dalam posisi surplus kembali (sebesar Rp 121,05 miliar). Surplus APBD yang pada tahun 2012 sebesar Rp 52,15 miliar; pada tahun 2016 defisit, dan pada tahun 2017 surplus kembali. Gambaran realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Pati selama Tahun 2012–2017 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pati dan Rata-Rata Pertumbuhan Tahun 2012 – 2017****(dalam Ribuan Rupiah dan Persen)**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertum- buan (%)
1.	PENDAPATAN	1,477,993,190	1,706,030,888	1,940,575,704	2,181,691,961	2,445,063,690	2,768,528,451	13.37
2.	BELANJA	1,425,840,271	1,653,021,493	1,862,733,253	2,136,260,319	2,583,065,999	2,647,474,107	13.18
	Surplus / Defisit ()	52,152,919	53,009,395	77,842,452	45,431,642	(138,002,309)	121,054,345	
3.	PEMBIAYAAN	152,840,790	195,610,830	240,857,327	301,036,055	316,484,252	161,706,010	1.13
3.1	Penerimaan Pembiayaan	166,706,790	205,551,830	248,918,327	319,036,055	346,108,517	178,840,343	1.42
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	13,866,000	9,941,000	8,061,000	18,000,000	29,624,265	17,134,333	4.32

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pati selama tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Pati diarahkan untuk meningkatkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan Belanja Daerah.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Pati diarahkan untuk meningkatkan kinerja (*performace*) dari Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah.
3. Sumber utama penerimaan pembiayaan daerah masih didominasi oleh penerimaan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya yang cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2012-2017. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Perusahaan / BUMD.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Patiselama kurun waktu Tahun 2012 – 2016 yang telah diaudit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Realisasi Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2012 –2016 (dalam Rupiah dan Persen)

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas						
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	189,839,313,194	224,849,788,874	269,893,214,868	297,272,515,976	133,565,100,949	-8.41
1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	363,586,247	80,000	30,943,800	14,941,358	0	-100.00
1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	4,701,150	9,877,715	0.00
1.1.1.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	15,154,395,124	23,770,436,124	33,714,705,556	34,853,967,488	44,906,964,044	31.20
1.1.1.5	Kas Lainnya	0	0	15,091,858,386	15,395,030,624	2,492,702,100	0.00
1.1.1.6	Setara Kas	0	0	0	0	0	0.00
1.1.1.7	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0.00
1.1.1.8	Piutang Pendapatan	1,538,647,340	3,525,110,384	41,951,857,231	42,811,294,524	32,973,016,906	115.16
1.1.1.9	Piutang Lainnya	6,588,751,271	16,008,025,300	19,799,946,870	10,914,190,536	0	-100.00
1.1.1.10	Penyisihan Piutang	(1,942,503,277)	(4,875,453,683)	(33,802,696,193)	(33,380,462,283)	(4,981,977,191)	26.55
1.1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0	75,780,750	128,996,166	94,747,946	142,185,220	0.00
1.1.1.12	Persediaan	19,730,614,432	23,427,348,965	18,890,508,200	16,401,709,433	21,207,449,019	1.82
	JUMLAH ASET LANCAR	231,272,804,331	286,781,116,714	365,699,334,884	384,382,636,752	230,315,318,762	-0.10
1.1.2	INVRESTASI JANGKA PANJANG						
1.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
1.1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kpd Entitas Lainnya	0	0	0	0	0	0.00
1.1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0	0	0	0	0	0.00

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertum- buan (%)
1.1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	0.00
1.1.2.1.4	Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0.00
1.1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0.00
1.1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	5,736,973,660	1,800,590,585	1,320,917,637	950,118,607	476,449,450	-46.32
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5,736,973,660	1,800,590,585	1,320,917,637	950,118,607	476,449,450	-46.32
1.1.3	Investasi Jangka Panjang Permanen						
1.1.3.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	49,207,851,001	61,158,855,414	72,541,176,237	90,534,944,255	123,106,572,060	25.77
1.1.3.2	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	49,207,851,001	61,158,855,414	72,541,176,237	90,534,944,255	123,106,572,060	25.77
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	54,944,824,661	62,959,445,999	73,862,093,873	91,485,062,862	123,583,021,510	22.46
1.2	ASET TETAP						
1.2.1	Tanah	117,546,940,540	183,032,225,299	180,746,243,114	2,374,115,453,654	3,417,343,838,254	132.20
1.2.2	Peralatan dan Mesin	213,165,421,847	254,910,346,296	312,057,856,171	387,971,657,050	451,805,280,517	20.66
1.2.3	Gedung dan Bangunan	520,803,578,092	584,695,522,256	651,343,197,729	778,371,025,786	875,417,904,902	13.86
1.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	475,716,841,530	571,071,040,515	618,517,717,422	640,683,102,078	903,266,008,174	17.39
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	52,863,969,684	53,759,356,402	41,740,819,363	44,254,790,524	43,669,151,542	-4.66
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7,946,460,312	7,142,969,000	0	22,584,332,205	332,991,134	-54.76
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	(683,638,353,515)	(472,423,879,261)	0.00
	JUMLAH ASET TETAP	1,388,043,212,006	1,654,611,459,767	1,804,405,833,799	3,564,342,007,782	5,219,411,295,262	39.25
1.3	DANA CADANGAN						

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
1.3.1	Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0.00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	0	0.00
1.4	ASET LAINNYA						
1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	2,098,581,417	2,080,351,417	0.00
1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6,226,628,000	6,313,188,000	6,313,188,000	6,410,859,137	6,410,859,137	0.73
1.4.3	Aset Tidak Berwujud	1,477,071,000	1,620,699,500	2,716,214,300	3,283,132,400	2,127,009,479	9.54
1.4.4	Aset Lain-lain	8,529,918,075	9,801,838,485	17,879,934,834	6,236,025,854	36,140,665,186	43.47
	JUMLAH ASET LAINNYA	16,233,617,075	17,735,725,985	26,909,337,134	18,028,598,808	46,758,885,219	30.28
	JUMLAH ASET	1,690,494,458,073	2,022,087,748,465	2,270,876,599,690	4,058,238,306,204	5,620,068,520,754	35.03
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2	Utang Bunga	0	0	0	0	0	0.00
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0.00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	339,934,006	925,611,838	0.00
2.1.5	Utang Beban	0	0	0	22,246,934,101	11,482,961,452	0.00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	9,762,163,422	0	0	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0	9,762,163,422	22,586,868,107	12,408,573,290	0.00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0.00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0	0.00

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	0	9,762,163,422	22,586,868,107	12,408,573,290	0.00
3	EKUITAS						
3.1	EKUITAS	1,690,494,458,073	2,022,087,748,465	2,261,114,436,268	4,035,651,438,097	5,607,659,947,463	34.96
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,690,494,458,073	2,022,087,748,465	2,270,876,599,690	4,058,238,306,204	5,620,068,520,754	35.03

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Dari tabel di atas, maka untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Pati, akan dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati
Tahun 2012 – 2016

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN					RATA-RATA
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Rasio Likuiditas :						
1.1	Rasio Lancar	0.00	0.00	37.46	17.02	18.56	14.61
1.2	Rasio Quick	0.00	0.00	35.53	16.29	16.85	13.73
2	Solvabilitas :						
2.1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0.0000	0.0000	0.0043	0.0056	0.0022	0.0024
2.2	Rasio Total Hutang Terhadap Modal	0.0000	0.0000	0.0078	0.0056	0.0022	0.0031

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2016 sebesar 18,56. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sebesar 18 kali lebih.

2. Rasio *Quick*

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio *Quick* pada Tahun 2016 sebesar 16,85. Ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Pati dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2016 sebesar 0,0022. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain.

Pada Tahun 2016 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Pati sebesar 0,0022. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pati, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2012 –2016

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Penjelasan secara rinci akan dibahas pada bagian berikut.

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Pati bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Proporsi penggunaan angrang yang dimaksud di sini merupakan besaran atau rasio yang didapatkan dari besaran / total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran (yang merupakan penjumlahan dari Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran; yang dinyatakan dalam satuan persen.

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Pati selama tahun 2014–2017 dihitung dari beberapa rincian yang ada dalam pos Belanja Tidak Langsung dan pos Belanja Langsung. Rincian pemenuhan yang masuk dalam pos Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri atas: (i) Belanja Gaji dan Tunjangan; (ii) Belanja Tambahan Penghasilan; (iii) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH; (iv) Belanja Pemungutan Pajak Daerah; dan (v) Belanja Penghasilan Lainnya
- b. Belanja Langsung, terdiri atas: (i) Belanja Honorarium PNS; (ii) Belanja Uang Lembur; (iii) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; (iv) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS; (v) Belanja Premi Asuransi Kesehatan; (vi) Belanja Makanan dan Minuman Pegawai; (vii) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya; (viii) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu; (ix) Belanja Perjalanan Dinas; (x) Belanja Perjalanan Pindah Tugas; (xi) Belanja Pemulangan Pegawai; dan (xii) Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan dll).

Gambaran perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Pati selama tahun 2014–2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kabupaten Pati Tahun 2014 – 2017 (dalam Ribuan Rupiah)**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017
A	Belanja Tidak Langsung	1,015,385,523	1,076,586,804	1,117,507,972	1,018,241,694
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	710,297,596	770,592,290	803,747,323	733,262,213
2	Belanja Tambahan Penghasilan	16,609,575	298,145,510	306,032,308	275,775,823
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3,099,000	4,380,000	4,325,000	5,329,675
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	2,791,685	3,469,005	3,403,341	3,873,983
5	Belanja Penghasilan Lainnya	282,587,666	-	-	-
B	Belanja Langsung	78,516,668	88,992,454	99,788,658	103,302,157
1	Belanja Honorarium PNS	18,177,305	18,899,259	11,455,904	11,435,391
2	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	38,400	14,000	30,500	22,000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1,499,883	1,869,668	11,052,190	6,083,214
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1,040,233	432,412	719,390	1,364,828
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	13,568,612	15,091,330	17,341,836	20,599,694
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,524,407	4,530,065	1,986,916	1,927,294
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	920,105	2,501,514	836,713	980,927
9	Belanja Perjalanan Dinas	21,351,717	20,179,471	27,394,775	32,936,463
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	196,625
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan dll)	20,396,005	25,474,736	28,970,434	27,755,721
	TOTAL	1,093,902,191	1,165,579,259	1,217,296,629	1,121,543,850

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Pati selama tahun 2014–2017 terus mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp 1,09 triliun pada tahun 2014; meningkat menjadi sekitar Rp 1,12 triliun pada tahun 2017 atau meningkat sekitar Rp 27,64 miliar.

Jika besaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Pati selama tahun 2014-2017 dibagi dengan besaran total pengeluaran (yang merupakan penjumlahan dari Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran) akan ditemukan besaran proporsi sebagai berikut.

Tabel 3.9

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014-2017 (dalam Ribuan Rupiah dan Persen)

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2014	1,093,902,191	1,870,794,253	58.47
2	Tahun Anggaran 2015	1,165,579,259	2,154,260,319	54.11
3	Tahun Anggaran 2016	1,217,296,629	2,612,690,264	46.59
4	Tahun Anggaran 2017	1,121,543,850	2,664,608,440	42.09

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama Tahun 2014-2017 mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan kenaikan gaji setiap tahun. Dari Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa bahwa selama Tahun 2014-2017 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total belanja daerah masih cukup tinggi, yaitu dari sekitar 58,47% (tahun 2014) menurun menjadi sebesar 54,11% (tahun 2015); dan menurun lagi menjadi sekitar 46,59% (tahun 2016), dan menurun lagi menjadi sekitar 42,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Pati semakin baik, seiring dengan terjadinya penurunan dalam proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.

2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang secara konsep APBD setiap tahun bernilai Rp.0,00 dan SiLPA Riil yang merupakan dampak dari pelaksanaan APBD.

Selama tahun 2014-2015, APBD di Kabupaten Pati berada dalam kondisi

Surplus, yaitu sebesar Rp 69,78 miliar pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp 27,43 miliar pada tahun 2015. Kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2016, yaitu mengalami defisit sebesar - Rp 167,62 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi surplus sebesar Rp 103,92 miliar. Gambaran kondisi defisit riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati (APBD) Tahun 2014–2017, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Sementara untuk menutup defisit anggaran di Kabupaten Pati selama tahun 2014-2017 digunakan 2 (dua) pos besar, yaitu: (i) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, dan (ii) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Gambaran komposisi penutup defisit riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati (APBD) Tahun 2014–2017, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.10**Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014 –2017 (dalam Ribuan Rupiah)**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1,940,575,704	2,181,691,961	2,445,063,690	2,768,528,451
	Dikurangi Realisasi :				
2.	Belanja Daerah	1,862,733,253	2,136,260,319	2,583,065,999	2,647,474,107
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8,061,000	18,000,000	29,624,265	17,134,333
	Surplus/(Defisit) Riil	69,781,452	27,431,642	(167,626,574)	103,920,012

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Tabel 3.11

**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati sebagai Proporsi dari Surplus / Defisit
Tahun 2014 –2017 (dalam Ribuan Rupiah)**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	248,620,225	318,730,723	345,769,754	178,481,943
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	298,102	305,333	338,763	358,400
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Di lain pihak, besaran pelampauan penerimaan PAD; Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan; Pelampauan penerimaan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya; Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; Kegiatan lanjutan; dan Selisih Pembiayaan; serta nilainya terhadap realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014 -2017, dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besaran SiLPA selama kurun waktu 2014-2017 terus mengalami fluktuasi. Besaran SiLPA yang pada tahun 2014 sebesar Rp 318,70 miliar; pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 346,47 miliar, pada tahun 2016 menurun menjadi Rp 178,48 miliar, serta naik lagi menjadi Rp 282,76 miliar pada tahun 2017.

Gambaran realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014 -2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014 –2016 (dalam Ribuan Rupiah dan Persen)**

No.	Uraian	2014		2015		2016		2017		Rata-Rata Pertum- buhan (%)
		Nilai	% Dari SiLPA	Nilai	% Dari SiLPA	Nilai	% Dari SiLPA	Nilai	% Dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	318,699,779	100.00	346,436,754	100.00	178,481,943	100.00	282,760,354	100.00	-3.91
1.	Pelampauan penerimaan PAD	40,919,045	12.84	41,546,089	11.99	24,451,804	13.70	32,140,500	11.37	-7.73
2.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	7,303,507	2.29	(13,850,086)	(4.00)	(56,122,985)	(31.44)	(19,087,358)	(6.75)	-237.74
3.	Pelampauan penerimaan lain-Lain pendapatan daerah yang sah	33,195,126	10.42	14,218,284	4.10	11,557,637	6.48	42,698,912	15,10	8.75
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	236,483,998	74.20	304,217,134	87.81	199,155,889	111.58	65,302,291	23,09	-34.88
5.	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7.	Selisih Pembiayaan	798,102	0.25	336,277	0.10	(560,402)	(0.31)	161,706,010	57,19	487.34

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.1.1. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasar atas capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017, maka pendapatan sampai dengan tahun 2022 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pati, dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. **Intensifikasi PAD**, melalui:
 - a. Optimalisasi sistem pajak *on line* dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
 - b. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan SKPD kurang bayar kepada wajib pajak.
 - c. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
 - d. Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
 - e. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
 - f. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
 - g. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
 - h. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
 - i. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
2. **Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi**, melalui:
 - a. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
 - b. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax bassed) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
 - c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Gambaran proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2017 – 2022 dapat diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.13. Dari Tabel 3.13 dapat dilihat bahwa proyeksi Pendapatan Daerah selama 5 (lima) dari 2017 – 2022 akan mengalami peningkatan secara berarti.

Pendapatan Daerah yang pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 2,77 triliun; pada akhir tahun 2022 telah meningkat menjadi Rp 3,23 triliun. Di lain pihak, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari Rp 449,11 miliar pada tahun 2017; meningkat menjadi sekitar Rp 513,86 miliar pada tahun 2022. Peningkatan PAD terutama akan dihasilkan dari pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Selain itu peningkatan PAD dilakukan dengan

meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD, serta lain-lain PAD sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan. Gambaran proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2017 – 2022, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13**Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 (dalam Ribuan Rupiah)**

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PENDAPATAN	3.15	2,768,528,451	2,527,256,441	2,835,564,520	2,960,952,098	3,081,613,985	3,232,562,335
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.73	449,106,854	319,653,341	388,085,363	428,209,429	458,564,573	513,863,981
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.20	73,677,157	66,339,000	69,364,692	73,341,736	77,475,316	82,133,247
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.09	19,009,369	17,853,526	18,799,755	19,879,764	20,917,002	22,135,590
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.47	14,643,421	15,937,500	15,741,959	16,529,057	17,355,510	18,223,285
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.75	341,776,907	219,523,315	284,178,957	318,458,872	342,816,745	391,371,859
1.2	Dana Perimbangan	3.71	1,689,030,336	1,685,657,244	1,778,243,474	1,856,249,188	1,938,935,244	2,026,582,464
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.06	39,792,643	41,948,713	41,948,713	41,948,713	41,948,713	41,948,713
1.2.2	Dana Alokasi Umum	5.47	1,186,296,947	1,207,508,997	1,300,095,227	1,378,100,941	1,460,786,997	1,548,434,217
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-1.18	462,940,746	436,199,534	436,199,534	436,199,534	436,199,534	436,199,534
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.89	630,391,261	521,945,856	669,235,683	676,493,481	684,114,168	692,115,890
1.3.1	Pendapatan Hibah	-18.83	7,734,814	2,725,152	2,725,152	2,725,152	2,725,152	2,725,152
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-0.52	172,499,977	135,360,731	145,155,956	152,413,754	160,034,441	168,036,163
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4.14	371,401,422	317,453,410	454,948,012	454,948,012	454,948,012	454,948,012
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	78,755,048	66,406,563	66,406,563	66,406,563	66,406,563	66,406,563
1.3.5	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

3.3.1.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Pati selama Tahun 2017 – 2022 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Pati, selama kurun waktu 2017-2022;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang ber-Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;
- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- f. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
- g. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja langsung daerah tahun 2017-2022 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2016, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2017, dengan mempertimbangkan komitmen internasional dan dinamika kebijakan nasional.

Proyeksi kebutuhan Belanja Daerah di Kabupaten Pati selama tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14

Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 (dalam Ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	BELANJA	4.22	2,647,474,107	2,101,273,684	2,850,855,206	2,977,789,519	3,101,592,789	3,255,167,793
2.1	Belanja Tidak Langsung	6.88	1,633,350,389	1,536,377,497	1,995,820,163	2,084,277,900	2,170,553,681	2,277,576,730
2.1.1	Belanja Pegawai	8.40	1,018,241,694	905,033,720	1,332,818,295	1,392,795,119	1,451,292,514	1,523,857,139
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	-0.11	30,254,842	15,881,463	30,092,663	30,092,663	30,092,663	30,092,663
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0.49	5,592,847	7,619,630	5,013,228	5,238,823	5,458,854	5,731,796
2.1.5	Belanja Bagi Hasil	8.33	8,282,703	9,620,000	10,809,032	11,295,438	11,769,847	12,358,339
2.1.6	Belanja bantuan Keuangan	4.27	567,096,011	593,222,684	611,468,945	638,985,047	665,822,419	699,113,540
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	10.59	3,882,293	5,000,000	5,618,000	5,870,810	6,117,384	6,423,253
2.2	Belanja Langsung	-0.73	1,014,123,718	806,636,833	855,035,043	893,511,619	931,039,108	977,591,063
2.2.1	Belanja Pegawai	6.40	30,381,373	34,184,693	36,235,775	37,866,385	39,456,774	41,429,612
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.08	534,893,178	465,760,590	493,706,226	515,923,006	537,591,772	564,471,361
2.2.3	Belanja Modal	-3.70	448,849,166	306,691,549	325,093,042	339,722,228	353,990,562	371,690,090
	Surplus / Defisit ()		121,054,345	425,982,757	(15,290,686)	(16,837,421)	(19,978,804)	(22,605,458)
3	PEMBIAYAAN	-14.93	161,706,010	71,838,492	66,387,101	67,392,777	69,976,869	72,029,513
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-12.50	178,840,343	89,348,492	84,422,401	85,969,136	89,110,519	91,737,173
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.84	17,134,333	17,510,000	18,035,300	18,576,359	19,133,650	19,707,660

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Dari Tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah yang pada tahun 2017 diperkirakan mencapai sekitar Rp 2.65 triliun; pada tahun 2022 telah mencapai sekitar Rp 3,26 triliun. Pos Belanja Tidak Langsung masih mendominasi dalam pos Belanja Daerah secara keseluruhan, di mana besarnya mencapai sekitar Rp 1,63 triliun (atau sekitar 61,69%) pada tahun 2017; meningkat menjadi sekitar Rp 2,28 triliun (atau sekitar 69,97%) pada akhir tahun 2022. Dalam kondisi yang demikian, maka besaran Belanja Langsung ke program dan kegiatan masih sekitar 38%.

3.3.1.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perhitungan kerangka pendanaan diperoleh dari penjumlahan atas Pendapatan Daerah ditambah dengan Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) serta ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran; kemudian dikurangi dengan Belanja Tidak Langsung (Belanja Wajib Mengikat) dan Pengeluaran Pembiayaan.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2017– 2022, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.15. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan di Kabupaten Pati selama tahun 2017-2022 telah mengalami peningkatan dari sekitar Rp 1,33 triliun pada tahun 2017; ,meningkat menjadi sekitar Rp 1,56 triliun pada akhir tahun 2022. Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Pati selama tahun 2017-2022; selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017- 2022 (dalam Ribuan Rupiah)**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	2,768,528,451	2,527,256,441	2,835,564,520	2,960,952,098	3,081,613,985	3,232,562,335
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran	178,840,343	89,348,492	84,422,401	85,969,136	89,110,519	91,737,173
	Total Penerimaan	2,947,368,794	2,616,604,933	2,919,986,921	3,046,921,234	3,170,724,504	3,324,299,508
	Dikurangi :						
4	Belanja Tidak Langsung (Belanja Wajib Mengikat)	1,597,502,701	1,745,028,722	1,745,028,722	1,745,028,722	1,745,028,722	1,745,028,722
5	Pengeluaran Pembiayaan	17,134,333	17,510,000	18,035,300	18,576,359	19,133,650	19,707,606
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,332,731,760	854,066,211	1,156,922,899	1,283,316,153	1,406,562,132	1,559,563,126

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang akan digunakan / dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 158 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Kapasitas riil keuangan Daerah, dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga; dengan penjelasan: (i) Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (ii) Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta (iii) Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Pati selama tahun 2017-2022; selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.16. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2017-2022 kapasitas kemampuan keuangan riil telah mengalami peningkatan dari sekitar Rp 1,33 triliun pada tahun 2017; meningkat menjadi sekitar Rp 1,56 triliun pada akhir tahun 2022. Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Pati selama tahun 2017-2022; selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017- 2022 (dalam Ribuan Rupiah)**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,332,731,760	854,066,211	1,156,922,899	1,283,316,153	1,406,562,132	1,559,563,126
2	PRIORITAS PERTAMA (Biaya Belanja Langsung Wajib dan Mengikat)	186,601,310	119,581,358	161,985,581	179,682,425	196,938,607	218,360,912
3	PRIORITAS II (Biaya Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah)	734,923,300	470,967,359	637,975,037	707,673,494	775,636,414	860,007,477
4	PRIORITAS III (Biaya Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya)	411,207,151	263,517,494	356,962,281	395,960,233	433,987,111	481,194,737

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kapasitas kemampuan keuangan riil yang besarnya mencapai Rp 1,33 triliun pada tahun 2017; dan meningkat menjadi sekitar Rp 1,56 triliun pada akhir tahun 2022; akan dialokasikan ke PRIORITAS PERTAMA (Biaya Belanja Langsung Wajib dan Mengikat); PRIORITAS II (Biaya Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah) serta PRIORITAS III (Biaya Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya). Gambaran alokasi / penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Pati selama tahun 2018-2022; selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.16 di atas.

Oleh sebab adanya keterbatasan APBD Pemerintah Kabupaten Pati, maka untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pati; masih diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya yaitu dari sumber dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Donor, *Corporate Social Responsibility*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL) dan partisipasi masyarakat lainnya.

